

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Selama beberapa dekade, konflik di Mediterania Timur melibatkan perselisihan antara Turki, Yunani, dan Republik Siprus tentang tiga hal utama yaitu perairan teritorial, kedaulatan, dan narasi nasional eksklusif. Perselisihan ini dimulai dengan perang kemerdekaan Yunani pada 1830-an, perjanjian damai Lausanne yang menetapkan batas-batas Republik Turki pada 1923, dan ketidakmampuan untuk mendirikan negara federal bikomunal di Siprus pada 1960. Dalam hal konflik Siprus, Rencana Annan 2004, yang menyarankan pembentukan negara federal bikomunal, adalah peluang terbaik yang akhirnya gagal. Saat ini, konflik di Mediterania Timur telah berkembang menjadi perebutan kekuasaan yang melibatkan berbagai pihak dan tingkatan, dan tampak sulit untuk diselesaikan (Alaranta, 2021).

Laut Mediterania Timur merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya energi, terutama gas alam, yang menarik perhatian banyak negara di sekitarnya. Selain memiliki potensi ekonomi yang besar, wilayah ini memiliki nilai geopolitik yang signifikan bagi banyak negara, karena lokasinya yang strategis sebagai penghubung antara Eropa dan Asia (Sujudi, 2024). Namun, perairan secara alami memiliki permukaan yang dinamis dan tidak dapat diukur secara permanen, sehingga berpotensi menimbulkan konflik terkait hak atas cadangan gas. Akibatnya, klaim teritori seringkali saling tumpang tindih antar negara karena didasarkan pada hukum dan argumen yang beragam (Ramadhan, 2022).

Secara geografis, Turki memiliki perbatasan langsung dengan Laut Mediterania Timur di bagian selatannya. Ini memberinya kesempatan untuk mengakses secara langsung potensi cadangan gas alam di wilayah tersebut. Karena negara ini sangat bergantung pada impor energi, yang menjadikan keamanan pasokan energi menjadi hal penting bagi pemerintah Turki (Sujudi, 2024). Area ini menjadi salah satu yang paling diperebutkan karena kebutuhan

energi yang meningkat di seluruh dunia. Negara-negara seperti Yunani, Siprus, Israel, Mesir, dan Turki mengklaim zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang kaya energi (Kavaz, 2021). Dengan keterlibatan pihak eksternal seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang mendukung klaim beberapa negara di kawasan tersebut, ketegangan semakin meningkat. Turki, yang memiliki sejarah panjang dalam sengketa teritorial dengan Yunani dan Siprus, memandang Laut Mediterania Timur sebagai wilayah yang sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi dan keamanan nasionalnya (Sujudi, 2024).

Hubungan antara Turki dan Yunani dalam konteks sejarah telah lama diwarnai oleh ketegangan. Ketegangan antara Yunani dan Turki di Laut Mediterania mulai meningkat pada tahun 2019, ketika Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui oleh PBB. Perjanjian tersebut mengawali batas maritim kedua negara di Laut Mediterania (United Nations Treaty Collection, 2019). Batas-batas ini ditetapkan sebagai zona ekonomi eksklusif. Artinya, kedua negara, baik Turki maupun Libya, memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi minyak dan gas yang terkandung di dalamnya (Yildiz, 2020). Perjanjian itu bertujuan untuk melindungi hak-hak Turki dibawah hukum internasional, dan menambahkan bahwa Turki tidak dapat mencapai perjanjian semacam itu dengan beberapa negara lain, tetapi dapat melakukannya di masa depan (Ardhana, 2022). Namun, langkah ini memicu kritik dari Yunani dan Siprus, yang menuduh Turki melanggar hukum internasional. Ketegangan semakin memanas dalam bentuk latihan militer, insiden maritim, dan retorika yang semakin agresif antarnegara di kawasan tersebut (Stanicek, 2020).

Dibawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Turki mengimplementasi kebijakan luar negeri yang bersifat ekspansionis yang didasarkan pada doktrin Neo-Ottomanisme. Doktrin ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Kesultanan Ottoman sebagai pusat peradaban Islam di era modern. Kebijakan ini difokuskan pada penguatan geopolitik di wilayah bekas Kesultanan Ottoman, termasuk Laut Mediterania Timur (Ramadhan, 2022). Kebijakan ini dimulai pada tahun 2020

dengan berbagai tindakan ofensif, seperti operasi "zona aman" di Suriah Utara, intervensi di Libya, dan pengiriman kapal riset Oruc Reis ke Laut Mediterania Timur yang dikawal Angkatan Laut Turki. Langkah ini memicu ketegangan dengan koalisi Yunani-Siprus hingga hampir memicu konflik terbuka pada 13 Agustus 2020. Namun, diplomasi berhasil memperbaiki keadaan dan menghindari perang (Ramadhan, 2022).

Dalam visi geopolitik Erdogan, terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang nasionalis dan kuat, melihat Laut Mediterania Timur sebagai bagian penting dari visinya yang disebut "*Mavi Vatan*" atau "*Blue Homeland*," Turki berusaha mengamankan wilayah laut strategis yang menjadi bagian penting dari kepentingan nasional, termasuk pasokan energi (Lecha, 2021).

Penemuan cadangan gas alam yang besar di kawasan Laut Hitam pada Agustus 2020 menjadikan perselisihannya bersama Turki dan Yunani dalam klaim wilayah laut yang berada pada Timur Mediterania, di mana klaim kedua pihak disebabkan karena pasokan sumber daya alam berupa gas dan minyak yang berada dilepas pantai. Penemuan pasokan sumber daya alam ini tentunya dapat membantu perekonomian kedua negara terkhususnya memperkuat ambisi Turki untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, terutama dari Rusia, selain itu Turki juga berupaya mengamankan pasokan gas alam dalam jumlah besar, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mendukung ambisinya bergabung dengan Uni Eropa. Di sisi lain, Yunani juga melihat cadangan energi ini sebagai peluang ekonomi besar, nilai jual gas yang tinggi di pasar internasional menjadi peluang yang layak dimanfaatkan oleh Yunani terutama sebagai anggota Uni Eropa yang diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan impor gas sesama anggota Uni Eropa lainnya pada Rusia, melalui pemanfaatan sumber daya tersebut (Yoel, 2023).

Dalam upaya eksplorasi tersebut, kedua negara bersikeras untuk mengeksplorasi dan mengelola ladang gas lepas pantai di Laut Mediterania dan saling mengklaim garis kontinen mereka. Sengketa antar kedua negara diawali dengan Klaim Yunani bahwa Turki melanggar haknya di landas kontinen

Mediterania Timur dalam upaya pengeksploasian migas di perairan tersebut (Wintour, 2020). Konflik ini kemudian memanaskan karena kapal dari kedua negara tersebut saling bersenggolan pada Agustus 2020 (Firdaus, 2021).

Perselisihan antara Turki dan Yunani tentang pulau-pulau di Laut Aegea dan Mediterania Timur semakin meningkat, terutama karena tuntutan teritorial yang saling bertentangan. Penolakan Turki terhadap militerisasi Yunani di pulau-pulau tersebut merupakan masalah utama. Menurut Hasan Gogus, mantan duta besar Turki untuk Yunani dan Austria, banyak pulau Yunani di Laut Aegea, seperti Kastellorizo dan Kos, berada dekat dengan daratan Turki dari sudut pandang Turki. Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Paris tahun 1947, Yunani diberi pulau-pulau ini dengan syarat demiliterisasi. Namun, Turki percaya bahwa Yunani telah melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, Turki memperhatikan masalah lain seperti batas landas kontinen, wilayah udara, dan lebar laut teritorial (Falk, 2022).

Di sisi lain, Yunani menganggap klaim Turki melanggar status quo dan hukum internasional. Sotirios Zartaloudis, profesor politik perbandingan Eropa di Universitas Birmingham, mengatakan bahwa Yunani melihat Laut Aegea sebagai bagian penting dari wilayahnya karena banyaknya pulau di sana dan banyaknya orang Yunani di sana. Dia juga mengatakan bahwa Laut Aegea adalah jalur strategis yang menghubungkan Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan Laut Hitam. Hukum perselisihan ini didasarkan pada banyak perjanjian internasional, seperti Perjanjian Lausanne 1923, Montreux 1936, dan Paris 1947. Namun, interpretasi yang berbeda antara kedua negara, terutama mengenai status demiliterisasi pulau-pulau tersebut, menyebabkan konflik menjadi lebih buruk. Negosiasi bilateral untuk menyelesaikan perselisihan ini sangat sulit karena adanya ketidakpercayaan dan perbedaan pandangan tentang hukum internasional (Falk, 2022).

Keluhan historis, ambiguitas hukum, persaingan geopolitik, kepentingan ekonomi, politik dalam negeri, dan keterlibatan internasional semuanya berkontribusi terhadap eskalasi konflik sumber daya Turki dan Yunani pada tahun 2021. Pada Februari 2021, ketegangan antara Turki dan Yunani meningkat ketika Yunani mengirimkan jet tempur ke Laut Aegea di Mediterania Timur. Kementerian pertahanan Turki mengatakan bahwa empat jet tempur F-16 Yunani

terlibat dalam “tindakan provokatif” dan “mengganggu kapal Cesme” di perairan internasional Aegean Utara. Sumber pertahanan Turki juga menyebutkan bahwa salah satu pesawat Yunani menjatuhkan kartrid yang digunakan untuk membingungkan atau menonaktifkan radar lawan, berjarak 3,7 kilometer laut dari kapal Turki. Namun, kementerian pertahanan Yunani membantah tuduhan Turki dan mengatakan bahwa Angkatan udara mereka sedang melakukan latihan militer, dan berada cukup jauh dari kapal Turki. Hal ini memicu ketegangan antara kedua pihak. Akhirnya pihak Turki mengumumkan bahwa kapal Cesme akan melakukan survey hidrografi dari 18 Februari hingga 2 Maret (Firdaus, 2021). Christos Tarantilis, juru bicara pemerintah Yunani, menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan tindakan yang tidak perlu dan tidak mendukung terciptanya sentimen positif antara kedua negara. Namun, Hulusi Akar, Menteri Pertahanan Turki, menegaskan bahwa aktivitas hidrografi tersebut sepenuhnya bersifat teknis. Ia juga menambahkan bahwa Yunani telah melakukan kegiatan serupa di masa lalu (CNN, 2021). Konflik ini juga semakin diperburuk pada tahun 2021 ketika Yunani menganggap penempatan kapal eksplorasi dan pengeboran Turki, seperti Oruc Reis, di perairan yang disengketakan sebagai tantangan langsung terhadap kedaulatannya. Yunani, pada gilirannya, berusaha memperkuat aliansinya dengan pemain regional lainnya, seperti Siprus, Israel, dan Mesir, melalui perjanjian seperti Forum Gas EastMed pada Maret 2021, yang dilihat Turki sebagai upaya untuk mengisolasinya (Grekos, 2023).

Persaingan untuk mendapatkan sumber daya di Mediterania Timur telah menciptakan mentalitas *zero-sum*, di mana keuntungan apa pun oleh satu pihak dianggap sebagai kerugian oleh pihak lain (Aliyeva, 2024). Bagi Turki, akses ke sumber daya ini penting untuk memperkuat ekonominya dan mengurangi ketergantungannya pada impor energi, sementara Yunani dan Siprus memandang eksploitasi cadangan ini sebagai peluang untuk meningkatkan keamanan energi dan stabilitas ekonomi mereka (Axt, 2021). Taruhan ekonomi yang tinggi tercermin pada tahun 2021, yaitu dalam kegiatan eksplorasi agresif oleh Turki dan tindakan balasan yang diambil oleh Yunani, termasuk latihan militer dan upaya diplomatik untuk mendapatkan dukungan internasional (Isachenko & Kaymak,

2024).

Konflik tersebut juga meningkat sebagian besar karena faktor politik dalam negeri. Pada tahun 2021, baik Yunani maupun Turki menghadapi masalah internal, seperti ketidakstabilan politik dan kesulitan ekonomi, dan para pemimpin mereka menggunakan kebijakan populis dan retorika nasionalis untuk mendapatkan dukungan di dalam negeri (Tsakonias & Armakolas, 2023). Yunani menampilkan konflik tersebut sebagai upaya mempertahankan kedaulatan nasional terhadap agresi Turki, sementara Turki menggunakannya untuk memobilisasi sentimen nasionalis dan mengalihkan perhatian dari masalah ekonomi; politisasi konflik dalam negeri ini membuat kompromi menjadi lebih sulit dan mempercepat eskalasinya.

Di tengah konflik yang telah berlangsung sejak lama, khususnya terkait eksplorasi sumber daya energi di Mediterania Timur, isu pemutusan hubungan diplomatik antara Turki dan Yunani mencuat sebagai puncak dari perselisihan yang telah berlangsung lama. Permasalahan yang terkait selisih paham di wilayah di Mediterania, yang sebelumnya sempat mereda, kembali memanas ketika Turki dan Yunani hampir terlibat konflik militer terkait perebutan sumber daya energi di Mediterania Timur. Ketegangan ini sempat memuncak ketika Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengunjungi Amerika Serikat dan meminta Washington mempertimbangkan kembali penjualan senjata api ke Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menganggap langkah ini sebagai penghinaan, dan dia kemudian menyatakan bahwa dia tidak akan bertemu dengan pejabat Yunani sebelum bertemu dengan "politisi yang jujur" (CNBC, 2022).

Yunani dan Turki masih menjalin hubungan diplomatik meskipun konflik wilayah laut dan eksplorasi energi mewarnai hubungan mereka. Sebagian besar orang menganggap pernyataan Erdogan tentang pemutusan hubungan diplomatik sebagai gertakan untuk memperingatkan Yunani agar tidak merendahkan posisi Turki. Karena masing-masing negara memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut, lokasi geografis negara-negara tersebut yang berbatasan melalui Laut Aegea dan Mediterania menjadikannya tempat konflik. Hubungan yang fluktuatif dan konflik terus-menerus membentuk dinamika kausalitas antara upaya menjaga

stabilitas diplomatik dan kepentingan nasional (Falk, 2022).

Penelitian ini akan berfokus terhadap konflik perebutan sumber daya yang terjadi di Laut Mediterania Timur antara Turki dan Yunani pada tahun 2021, di tengah ketegangan yang terus berlanjut. Dengan menggunakan konsep segitiga konflik, penelitian ini akan menganalisis konflik berkepanjangan antara Turki dan Yunani, yang memunculkan isu pemutusan hubungan diplomatik akibat perebutan sumber daya di Laut Mediterania Timur. Konflik semacam ini tidak hanya berpotensi menghambat proses perdamaian dan upaya harmonisasi kedua negara, tetapi juga dapat mengancam stabilitas serta kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menyajikan sebuah pertanyaan penelitian tentang “Mengapa terjadi eskalasi konflik dalam sengketa perebutan sumber daya di Laut Mediterania Timur yang melibatkan Turki dan Yunani pada tahun 2021?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik perebutan sumber daya yang terjadi di Laut Mediterania Timur antara Turki dan Yunani pada tahun 2021.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan strategis Turki dan Yunani atas sumber daya energi, khususnya terkait konflik dari perebutan sumber daya antara Turki dan Yunani di Laut Mediterania Timur tahun 2021. Secara akademis, penelitian ini akan berkontribusi pada kajian hubungan internasional, khususnya mengenai pemahaman lebih mendalam tentang konflik di Laut Mediterania Timur, terutama dengan penerapan konsep segitiga konflik. Ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mempelajari konflik serupa di

wilayah lain. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah dan organisasi internasional terkait pendekatan terbaik dalam meredakan ketegangan di Laut Mediterania Timur, termasuk bagaimana menciptakan mekanisme mediasi yang lebih efektif.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Analisis Konflik dari Perebutan Sumber Daya antara Turki dan Yunani di Laut Mediterania Timur tahun 2021” akan diuraikan ke dalam lima bab yang terdiri lagi dari sub babasan. Berikut adalah urutan gambaran besar setiap babnya:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, pertanyaan riset/rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teoritis yang digunakan, yang mana dalam tulisan ini akan menggunakan teori konsep segitiga konflik. Selain itu bab ini juga akan menjabarkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tulisan ini, serta kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini dan teknik pengumpulan data yang didapat dalam penulisan ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi penjabaran dari pertanyaan rumusan masalah yang nantinya akan meliputi penjelasan, argumentasi, hingga analisis dari penulis.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari keseluruhan dari tulisan ini.